



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 763/III/2013

III/MARET 2013



DPR Panggil Paksa Dahlan Iskan

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MARET 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada minggu ketiga bulan Maret ini diawali dengan Rapat Paripurna tanggal 19 Maret. Namun kegiatan lain tetap terfokus pada berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan serta delegasi tamu DPR-RI dari Republik Serbia. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Maret 2013.

Rapat Paripurna 19 Maret

Rapat paripurna tanggal 19 Maret 2013 mengagendakan Penetapan Calon Hakim MK, Calon Deputy Gubernur BI, dan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tahunan BPK tahun 2012.

Penetapan Calon Hakim MK: Komisi III dalam Lapornya mengatakan bahwa sesuai dengan penugasan oleh Badan Musyawarah, Komisi III telah memproses seleksi calon hakim konstitusi sebagai pengganti hakim konstitusi Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. SH. SU periode 2008-2013 yang akan berakhir masa tugasnya pada 1 April 2013. Dalam proses pembahasan terdapat tiga calon, dan dalam pemilihan dengan suara terbanyak terpilih yaitu Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. MS. (42 suara); Dr. Sugiyanto, SH. MH. (5 suara); dan Dr. H. Djafar Elbram, SH. MH. SE., MM. Bc. (1 suara). Komisi III memilih Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. MS. atas dasar kesadaran dan keyakinan bahwa Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi. Hakim konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Calon Hakim Konstitusi terpilih, disetujui dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Penetapan Calon Deputy Gubernur BI: Komisi XI dalam laporannya mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 tata Tertib DPR, dengan memperhatikan penda-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



pat dan pandangan Fraksi-Fraksi dan musyawarah mufakat, memilih Saudara Perry Wariyo untuk menggantikan Deputy Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter. Komisi XI memberikan catatan, antara lain merekomendasikan saudara Perry Wariyo untuk memperjuangkan beberapa hal antara lain: [1] kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus berpihak pada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional; [2] kebijakan makroprudensial yang dijalankan harus mampu mewujudkan kebijakan yang *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, *pro-environment* dan menciptakan *financial inclusion*; [3] kebijakan lalu-lintas devisa yang dijalankan BI harus mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan pada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif dan fluktuatif; [4] meningkatkan dan memperkuat peran BI dalam pengelolaan dan pengendalian

inflasi Bank di pusat dan daerah, dengan mengupayakan inflasi berkisar di sekitar angka 5%; [5] memperkuat koordinasi antara BI dan Pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tahunan BPK tahun 2012: Komisi XI menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Peraturan Tata Tertib DPR, dengan memperhatikan pendapat dan pandangan Fraksi-Fraksi, berdasarkan musyawarah dan mufakat Komisi XI, sepakat untuk menunjuk KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab



Keuangan Tahunan BPK RI tahun 2012.

Kegiatan Bidang Legislasi

Pada bulan Maret ini, RUU Inisiatif DPR yang berpihak pada rakyat, yaitu RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai gencar disosialisasikan. RUU Tapera perlu secepatnya disahkan menjadi UU karena, *pertama*, Tapera merupakan solusi mendorong partisipasi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. *Kedua*, jika disahkan menjadi UU, maka Tapera solutif program kesejahteraan rakyat di tengah keterbatasan dana pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Dewasa ini, sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu memiliki rumah ataupun memenuhi rumah layak huni. Alasan lain, harga rumah melambung tinggi, selain keterbatasan penghasilan masyarakat. *Ketiga*, masyarakat golongan yang belum mampu ini, selama ini tidak bisa mendapatkan KPR. Dengan UU ini maka ada jaminan buat masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja tidak tetap untuk juga menikmati perumahan yang layak. Teknisnya diorientasikan pada gotong-royong dalam program kepemilikan rumah. Setiap warga berpenghasilan rendah diarahkan mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan khusus yang dikelola pemerintah. *Keempat*, menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi perlu partisipasi dan dukungan masyarakat. Selama ini, partisipasi masyarakat memang sudah ada lewat para pengembang. Namun, rumah yang tersedia umumnya tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Kelima*, dengan UU Tapera, diyakini akan ada mobilisasi dana rakyat bagi tersedianya perumahan yang layak.

Ketua DPR menyatakan, rata-rata bunga Tapera untuk kredit pembangunan rumah rakyat pada kisaran 6% dengan jangka waktu kredit paling lama 40 tahun. Beda dengan KPR melalui bank yang telah ada sekarang ini dengan masa kredit 15 tahun, namun suku bunga rata-rata di atas 11%.

Sementara, Ketua Pansus RUU Tapera Yosef Umar Hadi mengatakan, RUU Tapera sangat penting untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Di Indonesia, lanjut dia, masyarakat yang memiliki pekerjaan sekalipun, belum tentu mampu membeli rumah jika penghasilannya rendah. Masyarakat tidak bisa mengakses kredit kepemilikan rumah yang bunganya tinggi dan uang muka dalam jumlah besar yang dipatok pengembang. Itu sebabnya, kata dia, program subsidi untuk kepemilikan rumah yang terjadi adalah persaingan tak seimbang. Animo masyarakat untuk memiliki rumah begitu tinggi, namun ujung-ujungnya pemilik modal menengah dan besar yang bisa membeli rumah. Oleh karena itu, DPR membuat terobosan melalui RUU Tapera untuk mengerahkan pengumpulan dana dalam jumlah besar yang dikelola dan digunakan untuk kepemilikan rumah dengan kredit jangka panjang dan bunganya rendah, sehingga terjangkau untuk pekerja berpenghasilan rendah.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat Umum Tim Pengawas Century

dengan Ancora Grup, PT Graha Nusa Utama (GNU), Yayasan Fatmawati tanggal 20 Maret 2013 membuat beberapa catatan bahwa Timwas Century meminta penjelasan/keterangan mengenai: [1] aliran dana dari Robert Tantular melalui Bank Century yang diindikasikan merupakan bagian praktek pencucian uang hasil kejahatan Robert Tantular, [2] akuisisi PT. Ancora Land terhadap PT. Nusa Utama Sentosa dan PT Graha Nusa Utama; merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Timwas Century untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekomendasi DPR dalam Rapat paripurna DPR-RI tanggal 3 Maret 2010 terkait kasus Bank century.

Rapat memutuskan akan memanggil penyidik dari Mabes Polri dan Kejaksaan. Pemanggilan itu terkait sengketa PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (NUS) mengenai dana dari pemilik Bank Century, Robert Tantular. Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi silang pendapat yang disampaikan pihak PT GNU dan PT NUS termasuk Yayasan Fatmawati. Selain itu, Timwas akan membentuk tim kecil yang tujuannya untuk melakukan pengejaran aset atas dugaan aliran dana dari Robert Tantular di dalam negeri.

Pelantikan PAW

Rabu, 20 Maret 2013, Ketua DPR melantik tiga anggota DPR PAW, yaitu dari Partai Gerindra, Sdr. Dahlia, SH., dari Dapil Jakarta III, menggantikan Drs. H. Harun Al-Rasyid, MSi.; dari Partai Kebangkitan Bangsa Sdr. Jazilul Fawaid, SQ., dari Dapil Jawa Timur II, menggantikan Hj. Lily Chodidjah Wahid, dan Drs. H. Andi Muawiyah Ramly dari Dapil Jawa Timur X, menggantikan Dr. H. A. Effendy Choirie.

Dalam acara pelantikan ini, Ketua DPR menyampaikan antara lain, bahwa tahun 2013 ini adalah tahun politik, karena aktifitas politik yang meningkat terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014. Agar pelaksanaan Pemilu berlangsung jujur dan adil, Ketua DPR mengajak untuk ikut mengawal pelaksanaannya. Seiring dengan persiapan pelaksanaan Pemilu, Partai-partai politik juga sedang mempersiapkan daftar calon sementara anggota legislatif. Pada saatnya, masyarakat juga diminta memberi masukan/mengkritisi calon-calon tersebut. Hanya rakyat-lah yang menentukan siapa yang berhak menjadi wakilnya di lembaga legislatif dan menjadi pemimpinnya, sesuai dengan kaidah dan prinsip demokrasi, yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya melalui Pemilu.

Diplomasi Parlemen

Ketua DPR-RI menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Republik Serbia Yang Mulia NEBOJŠA STEFANOVIĆ beserta delegasinya di gedung DPR-RI pada tanggal 18 Maret 2013 yang lalu. Kunjungan delegasi didasarkan atas undangan resmi Ketua DPR-RI yang disampaikan pada saat kunjungan delegasi BKSAP DPR-RI ke Serbia pada tanggal 6 November 2012 yang lalu. Kedua parlemen telah memiliki Grup Kerjasama Bilateral di masing-masing negara. Kunjungan Ketua Majelis Nasional Republik Serbia beserta delegasi menandakan komitmen kedua parlemen untuk melakukan kerjasama konkret, yang dikukuhkan melalui penandatanganan *Memoandum of Understanding on Inter-Parliamentary Cooperation* antara DPR-RI dan Majelis Nasional Republik Serbia.

Memorandum of Understanding on Inter-Parliamentary Cooperation yang ditandatangani memuat rencana kerjasama tukar-menukar informasi, dialog, pengalaman, dan konsultasi atas beragam isu (*legislative drafting, parliamentary database*, dan berbagai isu-isu parlemen lainnya), antar komisi, komite, dan badan, yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama antarparlemen. Kegiatan tersebut dijalankan dalam bentuk pengiriman delegasi parlemen, serta juga melalui

mekanisme lainnya, seperti melalui teknologi informasi dan komunikasi yang ada di kedua parlemen.

Delegasi Republik Serbia melakukan kunjungan dan pembicaraan dengan beberapa petinggi pemerintahan Indonesia, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif. Selain itu, delegasi Serbia juga mengunjungi Istana Tampak Siring dan Ulundanu Beratan-Bedugul, Bali.**

DPR Panggil Paksa Dahlan Iskan



Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menemui Ketua DPR Marzuki Alie terkait pemanggilan paksa Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Sebagai tindaklanjut ketidakhadiran Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, dalam tiga kali undangan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI untuk menyelesaikan masalah buruh di BUMN, Rabu (20/3) pukul 09.00 WIB Komisi IX mendatangi kediaman Dahlan Iskan.

“Tadi pagi, jam 09.00 WIB Komisi IX telah berusaha ke rumah Dahlan Iskan untuk silaturahmi, sebetulnya persoalannya apa sehingga beliau tidak mau datang. Karena alasan surat yang dikirimkan ke Komisi IX klasik, seperti copy paste selalu ada acara,” papar Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).

Padahal, menurut Ribka, Komisi IX selalu mengirimkan undangan satu minggu sebelumnya. Itu artinya, tidak ada niatan politik yang baik, tidak ada rasa hati yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Padahal, menurutnya ini menyangkut persoalan perusahaan negara, uang rakyat. “Sementara kita lihat di media, Dahlan Iskan yang pencitraannya baik, tapi ternyata buktinya beda,” imbuhnya.

Dijelaskan politisi Fraksi PDIP ini, bahwa Komisi IX tidak berhasil menemui Dahlan Iskan di kediamannya. Kemudian berniat menyusul ke PLN karena menurut informasi ada acara di sana, namun ketika dikonfirmasi Dahlan Iskan tidak jadi datang dan membatalkan semua jadwalnya termasuk ke Lampung.

“Tadinya kita mau uber juga ke Lampung, makanya teman-teman Serikat Pekerja sudah siap mendampingi kita semua dan berinisiatif membawa tulisan Wanted Dahlan Iskan,” ucap Ribka sambil menunjukkan Karton bertulisan Wanted Dahlan Iskan.

Dia menyayangkan, Dahlan Iskan adalah seorang menteri yang seharusnya dihormati. “Teman-teman Komisi IX selalu mengingatkan Dahlan Iskan, bahwa beliau hanya dipilih oleh seorang presiden, tapi kami dipilih oleh ratusan ribu rakyat, kita kurang satu saja tidak bisa dilantik menjadi anggota DPR,” papar anggota DPR yang akrab disapa dengan Ning.

Ribka menambahkan, bahwa sebagai anggota Dewan mempunyai tanggung jawab moral kepada rakyat khususnya serikat pekerja-serikat pekerja yang mengadu ke Komisi IX. “Kita tidak main-main, kita akan terus cari beliau, kita akan terus kejar bersama teman-teman dari serikat pekerja sampai ketemu. Kalau beliau tidak punya niatan baik ke Komisi IX, kita juga akan mengadu ke pimpinan DPR sekiranya,” tegas Ribka.

Menurut Ning, Selasa lalu (19/3), dirinya sudah menghubungi Ketua DPR RI, dan Marzuki Alie sangat setuju dan mendukung tindakan Komisi IX, karena Meneg BUMN berkali-kali tidak menghadiri undangan rapat-rapat kerja Komisi VI dan Komisi VII.

“Saya bingung juga, apa ada kelainan jiwa, entah melecehkan parlemen atau melecehkan buruh,” tegasnya.

Ini sudah seperti aksi bersama, kata Ribka, antara Komisi IX DPR RI dengan teman-teman dari serikat pekerja. Biasanya, DPR di demo buruh, tapi ini sudah menjadi kesatuan. “Karena kita sudah sumpek mau bagaimana lagi, dengan Kementerian Tenaga Kerja sudah selesai, sekarang solusinya tinggal di Meneg BUMN,” imbuhnya.

Sementara Poempida Hidayatullah, Anggota Komisi IX (F-PG) yang menyertainya, menyatakan pemanggilan paksa yang dilakukan Komisi IX DPR RI merujuk pada UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Jadi ini adalah hak kewenangan DPR dalam hal melaksanakan hak pengawasannya dalam konteks legislatif. Jika dalam konteks yudikatif itu bisa melibatkan polisi, jadi tidak melibatkan polisi tidak apa-apa,” jelas Poempi.

Dukung Panggil Paksa

Selanjutnya Ribka dan kawan-kawan menemui Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Ketua DPR RI dalam kesempatan itu mempersilakan Komisi IX untuk menggunakan kewenangannya memanggil paksa Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, karena ketidakhadirannya dalam tiga kali undangan rapat Komisi IX membahas buruh di lingkungan BUMN.

“Sebaiknya Dahlan Iskan meluangkan waktu untuk menuntaskan permasalahan buruh di perusahaan plat merah tersebut,” kata Marzuki Alie.

Dia mengusulkan untuk mengadakan Rapat Gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX dengan mengundang Meneg BUMN Dahlan Iskan dan pemanggilan akan dijadwalkan dalam rangka membahas keluhan sejumlah pegawai BUMN.

“Menteri BUMN ini mitranya Komisi VI terkait korporasi, merjer dan akuisisi, bukan di Komisi IX. Komisi IX itu terkait buruhnya. Ini sebaiknya rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX,” tandas Marzuki. (sc) foto:ry/parle

Baleg Apresiasi Draft RUU Kelautan Usulan DPD



Ketua Baleg Ignatius Mulyono didampingi Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah dan Anna Mu'awanah menerima draft RUU Kelautan usulan DPD.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengapresiasi draf RUU Kelautan yang merupakan usulan DPD RI. Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia. Potensi kekayaan hayati dan non hayati kelautan Indonesia juga sangat luar biasa. Untuk itu, perlu dilindungi kekayaan bahari kita dengan undang-undang khusus kelautan.

Baleg DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPD RI membahas RUU Kelautan, Senin (18/3). Rapat dipimpin langsung Ketua Baleg Ignatius Mulyono (F-PD), didampingi para wakil ketua, Anna Muawwanah (F-PKB), Dimiyati Natakusumah (F-PPP), dan Sunardi Ayub (F-Hanura).

Ketua Baleg Ignatius Mulyono saat membuka rapat mengatakan, draf usulan dari DPD ini

merupakan usulan pertama yang diharmonisasikan. “Jadi, dengan demikian kelahiran RUU ini sungguh kita harapkan bersama. Harus berkualitas,” tandas Ignatius. Pembahasan RUU Kelautan ini menjadi fokus perhatian Baleg saat ini.

Draf RUU tersebut menjadi sangat berharga bagi Baleg DPR, karena memuat detail masalah kelautan nasional, tidak saja dari sisi hukum tapi juga ekonomi. “Itu sangat berguna bagi kami untuk dilanjutkan kepada fraksi-fraksi dan pihak-pihak yang akan ditugaskan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR terhadap RUU tersebut.”

Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, di-

dampingi para anggota DPD lainnya. Dalam kesempatan itu, Laode juga menyampaikan bahwa baru kali ini draf RUU dari DPD dijadikan acuan oleh DPR. Dan DPD sendiri telah menelaah lebih dalam RUU Kelautan ini dengan mengundang para pakar kelautan. Bahkan, DPD juga telah bekerja sama dengan 35 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

“Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena produktifitas dari DPD begitu besar,” puji Ignatius dalam rapat tersebut. Kualitas draf RUU ini sangat baik, karena dibahas cukup lama oleh DPD hingga akhirnya menjadi produk RUU yang diusulkan ke DPR. (mh)

Komisi VII Targetkan UU Konvensi Rotterdam Selesai April



Tim Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farihal saat Kunjungan Lapangan ke PT. Japan Medical Supply (PT. JMS) di Batam.

Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (RUU Konvensi Rotterdam) selesai April 2013.

“Kami menargetkan selesai pada masa sidang ini, sebelum April,” kata Wakil Ketua Komisi VII, Achmad Farihal, disela-sela Kunjungan Lapangan Komisi VII ke PT. Japan Medical Supply (PT. JMS) di Batam, Kamis (14/3).

Achmad Farihal menjelaskan, bahwa RUU tersebut akan memuat larangan penggunaan bahan kimia tertentu dalam industri di tanah air, tidak sekedar merk dagang. “Nanti akan detail

mengatur bahan kimia yang dilarang,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembahasan RUU Konvensi Rotterdam sudah hampir selesai dengan mengidentifikasi tujuh item bahan kimia B3. Adapun tujuh bahan kimia tersebut yakni *Dichloroethane*, *Isopropil Alkohol*, *Metilisobutilketon*, *Dichloro-pentafluoropropane*, *Dichloro-fluoroethane*, *Ethylene oxide* dan *Carbon oxide*, dan Metanol.

Selama pembahasan RUU Konvensi Rotterdam, menurutnya, belum ada industri yang menolak hal-hal yang terdapat dalam RUU tersebut.

Achmad Farihal menyatakan, bahwa tujuan Kunjungan Lapangan Komisi VII ke PT. JMS untuk memperoleh in-

formasi terutama yang terkait manfaat dan dampak yang timbul jika RUU Konvensi Rotterdam di setujui DPR, dan kesiapan pelaku usaha terkait pengaturan bahan kimia dan pestisida yang berbahaya sebagaimana diatur dalam RUU Konvensi Rotterdam, serta kesiapan pihak bea dan cukai selaku pihak yang bertanggung jawab memantau lalulintas barang yang masuk ke Indonesia.

Turut serta dalam Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke PT JMS Batam, antara lain Dalimi Abdullah DT. Indokayo (F-PD), Azwir Dainy Tara (F-PG), Ismayatun dan Daryatmo Mardiyanto dari F-PDIP, Muhammad Syafrudin (F-PAN), Irna Narulita (F-PPP), dan Mulyadi (F-Gerindra). (sc)



BAKN DPR : PT Bukit Asam Belum Menindaklanjuti Semua Temuan BPK

Dari 7 rekomendasi atas temuan BPK tahun 2010 baru enam yang ditindaklanjuti rekomendasinya, satu rekomendasi masih belum selesai ditindaklanjuti, karena saat ini PT Bukit Asam masih menyusun penyiapan kelengkapannya dan diharapkan pada tahun ini sudah dapat menyelesaikannya.

Demikian dikatakan Ketua Tim Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Fauzi Achmad yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Sumatera Selatan, pernyataan ini disampaikan pada saat melakukan pertemuan dengan Dirut PT Bukit Asam Maizal Gazali dan jajarannya di ruang rapat Hotel Novotel Palembang Jum'at (15/3) siang.

Ketua rombongan Fauzi Achmad yang sekaligus memimpin rapat mengatakan PT Bukit Asam semestinya segera meminta bantuan BPKP untuk melakukan penghitungan potensi kerugian perusahaan karena adanya kasus-kasus hukum yang sedang berjalan, semua rekomendasi BPK juga dapat segera terselesaikan.

Fauzi Achmad meminta, agar PT Bukit Asam lebih fokus dalam menghadapi semua persoalan yang ada didalam perusahaan tersebut, untuk mencegah

kerugian negara atau perusahaan baik yang sudah terjadi di waktu yang lalu atau disaat sekarang, serta mencegah dimasa yang akan datang.

Disamping itu, Fauzi meminta PT Bukit Asam harus dapat menjelaskan secara tertulis kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tentang saldo kas akhir tahun yang jumlahnya sangat besar yaitu berkisar 6 triliun rupiah lebih, terutama dikaitkan dengan rencana pembangunan bisnis perusahaan dan juga pertanggungjawaban efisiensi dan efektifitas sehingga dana tersebut tidak menjadi dana *idle*.

Dia mengemukakan, bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. "BAKN akan menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Komisi yang bersangkutan, serta hasil kerja BAKN juga akan diserahkan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala," ujarnya.

Ketua tim Fauzi Achmad menegaskan agar, PT Bukit Asam juga segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan kepada penegak hukum



Ketua Tim Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Fauzi Achmad saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Sumatera Selatan.

termasuk KPK, serta menyikapi dengan serius apabila terjadi hal-hal yang sama atau yang memang merugikan PT Bukit Asam sebagai Badan Usaha Milik Negara, secara otomatis juga akan merugikan keuangan negara.

Fauzi Achmad menambahkan, dengan adanya persoalan tanah yang diserahkan atau disewakan kepada PDAM Tirta Musi Sumatera Selatan, yang berkaitan penggunaan tanah yang belum terselesaikan segera diselesaikan agar kedua belah pihak dapat menjalankan aktifitasnya sesuai proporsinya masing-masing serta tidak ada ganjalan apapun, kata Fauzi. (Spy).

Komisi I Minta Program PLIK dan MPLIK di Moratorium



Anggota Komisi I DPR Tri Tamtomo.

Komisi I DPR RI meminta Program PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) dan MPLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang menjadi salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk dimoratorium sampai keluar hasil Audit BPK.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, Senin (18/3) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan.

PLIK dan MPLIK merupakan program pemerintah dibawah koordinasi dari Kemkominfo yang bertujuan untuk pemeratakan akses teknologi informasi dan komunikasi, meminimalisir kesenjangan informasi di segala bidang. Dengan kata lain, ide program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat terpencil dan di pedalaman untuk "melek" informasi dan teknologi.

Sayangnya, program yang awalnya bertujuan mulia ini, dalam kenyataannya tidak berjalan sesuai tujuan. Setelah melakukan kunjungan ke enam propinsi, Babel, Sulteng, Jabar, NTB, Jawa Timur dan Maluku, Panja (Panitia Kerja) PLIK dan MPLIK menemukan berbagai penyimpangan di dalam program ini.

Diantaranya adalah PLIK dan MPLIK yang seharusnya dibangun di wilayah terpecil, kenyataannya banyak yang dijalankan di kota kecamatan yang dekat dengan kota besar. PLIK yang dilaporkan sudah terinstall, namun ketika dicek banyak yang tak bekerja, alat-alat sudah hilang, dan alat tak memiliki sinyal. Bahkan ironisnya, tidak sedikit Camat yang tidak mengetahui bahwa program ini sudah berjalan.

Sebagai informasi, pembiayaan PLIK dan MPLIK berasal dari dana *Universal Service Obligation* (USO) yakni dana CSR dari 10 operator telekomunikasi di Indonesia. Dimana dalam Permen Kominfo mewajibkan setiap operator menyetorkan 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka menjadi dana PLIK dan MPLIK. Jika pendapatan kotor para operator itu sekitar Rp150

triliun per tahunnya, berarti sekitar 2,4 triliun digunakan PLIK dan MPLIK.

Menurut laporan BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) Kemenkominfo sejak 2010 program yang dilaksanakan dengan pendanaan multiyears itu baru mengeluarkan dana sekitar 800 miliar rupiah. Ini artinya ada dana sisa Rp1,6 triliun yang mengendap di rekening BP3TI.

“Saya bangga bapak menteri bisa menjelaskan dengan baik program-program yang telah dan akan dijalankan Kemenkominfo. Namun apa yang kami sampaikan ini dilatarbelakangi temuan panja tentang penyimpangan-penyimpangan dalam program PLIK dan MPLIK ini. Untuk itu sambil menunggu hasil audit dari BPK yang telah disampaikan Panja, lebih baik jika program ini dihentikan lebih dulu untuk sementara waktu,” jelas Tri Tamtomo dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty, dalam program ini terlihat lemahnya fungsi pengawasan. Untuk itu Evita meminta untuk membentuk konsultan independen selain

tentunya moratorium atau penghentian sementara program ini sampai evaluasi terhadap BP3TI Kemenkominfo.

“Sampai kapan moratoriumnya tergantung dari evaluasi terhadap BP3TI, yang jelas tujuan awalnya program yang baik untuk mencerdaskan bangsa tapi pada kenyataannya kami mendapati banyaknya anak-anak main games di warnet. Ini artinya tujuan dari program ini malah melenceng. Jangan sampai kita memberikan pisau tapi tidak tahu untuk apa pisau itu. Artinya bukan tidak mungkin program ini malah membuat anak bangsa menjadi korban, karena tidak adanya pendampingan terhadap konten,” papar Evita.

Menanggapi hal tersebut, Tifatul Sembiring mengatakan, mengapresiasi temuan-temuan dari Panja DPR RI sambil menunggu hasil audit dari BPK. Kementeriannya juga akan membentuk tim independen sendiri untuk mengevaluasi kinerja BP3TI dalam program PLIK dan MPLIK. Bahkan Tifatul akan melakukan pergantian personal dari BP3TI sebagai konsekuensi pembenahan diri di kementeriannya. (Ayu)

Bahas Agus, Komisi XI Undang BPK dan KPK



Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang.

Untuk mendapatkan rekam jejak Agus Martowardojo sebagai bahan pertimbangan di *fit and proper test* calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Komisi XI mengundang Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPK akan dilaksanakan pagi tadi, pukul 10.00 WIB, sedangkan dengan KPK pukul 14.00 WIB. Namun, rapat dengan BPK diundur menjadi pukul 14.00 WIB.

Anggota Komisi XI Muhammad Hatta berharap dengan datangnya BPK dapat memperdalam dugaan soal keterlibatan Agus dalam kasus Hambalang. Hatta menilai Menteri Keuangan tersebut selama ini dikenal sebagai sosok yang bersih, ditambah hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan tidak ada transaksi yang mencurigakan. Sebagai informasi, Komisi XI sudah melakukan RDP dengan PPATK pada minggu lalu, untuk mengetahui transaksi keuangan Agus.

“Kami ingin tahu apakah ada temuan-temuan untuk Agus di Kemenkeu. Saya khawatir dia terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi selain di proyek Hambalang. Untuk mengetahui lebih jelas, kami ingin mendengar langsung dari Ketua BPK,” ujar Hatta di Gedung Nusantara I, Senin (18/3).

Hatta menambahkan hasil rapat dengan BPK nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertanyaan Komisi XI dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI pada 25 Maret mendatang.

Terkait dengan perubahan jadwal, Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang menyatakan bahwa RDP dengan BPK ditunda.

“RDP dengan BPK hanya ditunda saja. Untuk rapat dengan KPK nanti kita atur lagi. Apakah perlu atau tidak,” tambah Andi. (sf)

DPR Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi dengan Serbia



Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima kunjungan Ketua National Assembly of the Republic of Serbia Nebojsa Stefanovic.

DPR mendorong peningkatan kerjasama antar kedua negara di berbagai bidang seperti sektor ekonomi, investasi, pariwisata dan sektor strategis lainnya.

“Kunjungan Parlemen Serbia ini dalam rangka meningkatkan hubungan yang telah terjalin sejak tahun 1961 lalu, sejak era Mantan Presiden RI Soekarno,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima kunjungan Ketua national assembly of

the Republic of Serbia Nebojsa Stefanovic, di Gedung Nusantara III, Senin, (18/3).

Menurutnya, dalam konteks hubungan politik prinsipnya dewan mendukung agar kerjasamanya diperluas dalam berbagai bidang seperti ekonomi. “Tidak hanya pemerintah parlemen juga memiliki peran penting di Era Demokrasi kali ini, jadi tidak hanya itu perlu juga didorong kerjasama antar rakyat kedua negara,” katanya.

Ketua *National assembly of the republic of Serbia* Nebojsa Stefanovic mengatakan, Parlemen Serbia berniat meningkatkan hubungan kedua negara dan antar parlemen. “Kami juga ingin kerjasama dan belajar dari parlemen Indonesia mengenai peran pengawasan dan kontrol, serta demokrasi di Indonesia,” jelasnya.

Dia menambahkan, parlemen dapat mempercepat proses ratifikasi antar kedua negara, dan membuka peluang baru serta mengurangi hambatan regulasi antar kedua negara serta saling tukar pendapat terkait berbagai persoalan yang krusial. (si), foto : eka hindra/parle/hr.

Sidang Paripurna DPR Tetapkan Hakim MK Terpilih

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sohibul Iman menerima secara bulat laporan Komisi III DPR RI yang telah berhasil memilih Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS sebagai Hakim Konstitusi yang baru. Penetapan ini untuk menggantikan Mahfud MD yang segera memasuki masa pensiun.

“Saya mewakili DPR mengucapkan selamat kepada Prof. Arief Hidayat atas terpilihnya beliau,” kata Sohibul dari meja pimpinan. Secara khusus ia menggarisbawahi harapan yang disampaikan Ketua Komisi III agar Hakim MK terpilih mengedepankan kenegarawanan.

“Dalam laporan Ketua Komisi III ada catatan soal kenegarawan yang saya pikir perlu bagi seorang Hakim MK, itu adalah sikap yang paling tinggi,” tambah Wakil Ketua DPR koordinator bidang ekonomi dan keuangan ini.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman berjabat tangan dengan Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika.

Prof. Dr. Arief Hidayat ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi setelah dalam pleno Komisi III memperoleh 42 suara. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

ini menyisihkan 2 kandidat lain Dr. Sugiyanto yang mendapat 5 suara dan Dr. Djafar Elbram dengan 1 suara. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

Soal Politik Dinasti Masih Tarik Ulur

Diskursus soal politik dinasti yang berkembang di daerah menjadi pembicaraan menarik. Perlu tidaknya memotong dinasti yang sedang berkuasa di daerah, masih menjadi pro-kontra antara yang mendukung dan tidak mendukung. Tarik-ulur masih terjadi di level wacana. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo, sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (19/3).

Saat ini Pansus DPR sedang membahas paket RUU Politik, di antaranya soal Pilkada. “Masih tarik ulur saja antara yang setuju dan tidak. Mungkin yang perlu dipertimbangkan ketika kemudian dinastinya itu, berada pada kandidat yang tidak kompeten. Ya pada saat itu publik pasti akan melihat bahwa dinasti keliru. Tapi, ketika dinasti berada pada orang yang berkompoten dan tidak boleh memimpin, maka publik akan *nyesel* itu. Maka, dua dilema ini belum bisa disatukan dalam satu rumusan,” ungkap Ganjar.

Menurut Anggota F-PDI Perjuangan ini, perlu ada pendidikan politik bagi masyarakat agar mampu menilai kandidat pemimpinnya dengan baik. Ketika politik dinasti mulai terlihat, masyarakat harus segera meresponnya, apakah kandidat kepala daerahnya berkompoten atau tidak. Bila tidak berkompoten, masyarakat pula yang harus membuat gerakan untuk tidak memilih.

Namun Ganjar berpendapat, masih dilematis memotong periode politik dinasti dalam wacana pembahasan RUU Pilkada tersebut. “Kalau kemudian mereka punya kompetensi yang bagus bagaimana? Bagaimana cara memotongnya?” Dia mencontohkan bagaimana anak Habibie harus ditarik statusnya dari PNS, padahal Ilham Habibie sangat berkompoten meneruskan kinerja ayahnya dalam bidang penerapan teknologi dirgantara di Indonesia.

Di tingkat internasional, ada contoh Bill Clinton ke Hillary Clinton atau keluarga Kennedy yang berpolitik di Amerika.



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Melihat realitas tersebut, Ganjar khawatir ada pelanggaran konstitusi di balik pelarangan politik dinasti sepanjang kandidat yang diajukan berkompoten.

“Maka, sebenarnya masalah dinasti atau tidak dinasti, partai mesti melakukan pendidikan politik dulu. Sehingga siapa pun yang akan dicalonkan untuk didudukkan, apakah dinasti atau tidak, mereka harus punya kapasitas yang cukup,” jelas Ganjar. Berbeda halnya bila kandidat yang diajukan lewat mekanisme perorangan. Walau pun tetap ada hubungan dinasti, maka itu tanggung jawab individual, bukan publik lagi.

Saat ini kecenderungan yang berkembang di internal Panja Pilkada, lanjut Ganjar, komposisinya lebih banyak yang tidak setuju persoalan dinasti diatur dalam Pilkada. Kalau pun hal ini mau diatur, sebaiknya pada sistem penyiapan kader. Misalnya, setiap calon bupati atau wakil bupati harus lolos dari proses kaderisasi itu. Minimal dia harus sekian tahun di partai tertentu. Dan sejauh ini pembahasannya belum mengerucut pada pilihan politik semacam itu. (mh) foto:wy/parle

Komisi III Siap Bahas Santet

RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang saat ini sedang dipersiapkan Komisi III DPR dipastikan



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

akan membahas isu santet dalam salah satu pasalnya. Memperhatikan realitas bangsa bukan tidak mungkin masalah ini akan diberi ruang penyelesaiannya secara hukum.

“Santet ini merupakan realitas bangsa, jadi kita pilih mana, orang yang dituduh memiliki santet dihakimi oleh masyarakat, dibunuh di jalanan atau diproses di pengadilan?” kata Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika menjawab pertanyaan wartawan sebelum Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (19/3).

Ia menambahkan, salah satu pilihan yang dipertimbangkan Komisi III adalah fenomena santet ini diserap kemudian diberi ruang penyelesaian

secara hukum. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan opsi ini dalam draf RUU KUHP yang telah diterima DPR.

“Ini sudah jadi usulan pemerintah dan kita siap membahasnya. Saya kira kita harus membuat UU yang sesuai napas nusantara, selama ini kita napas selalu pengaruh internasional,” lanjut politisi Partai Demokrat ini.

Pembahasan RUU KUHP saat ini telah memasuki tahapan menghimpun masukan dari pakar, praktisi hukum dan narasumber lainnya. Komisi III diharapkan dapat menyelesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode ini sekaligus mengakhiri era KUHP peninggalan penjajah Belanda. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Minta PT Timah Maksimalkan Usaha Dalam Negeri

Terkait Kinerja Keuangan tahun 2012 yang menurun, Komisi VII DPR meminta kepada PT Timah (Persero) untuk memaksimalkan pengembangan usaha di dalam negeri dan proaktif dalam mengatasi masalah *illegal mining* di wilayah IUP PT Pertamina (Persero).

Demikian salah satu butir kesimpulan RDP Komisi VII DPR dengan jajaran Direksi PT Timah (Persero) dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatogana di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin sore (18/3).

Menurut Soetan, Komisi VII DPR juga meminta kepada PT Timah (Persero) Tbk untuk memaksimalkan

pemanfaatan mineral-mineral ikutan yang mengandung maupun yang tidak mengandung radioaktif pada kegiatan industri timah agar memberikan nilai tambah bagi negara.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR RI mendesak kepada PT Timah (Persero) Tbk untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait akan berakhirnya kontrak karya (KK) PTKoba Tin paling lambat tanggal 22 Maret 2013, sebagai bahan pertimbangan Komisi VII DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI. (si)/
foto: iwan armanias/parle.



Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatogana.

DPR Tetapkan Perry Warjiyo Sebagai Deputy Gubernur BI



Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perry Warjiyo sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang pengelolaan moneter untuk menggantikan Deputy Gubernur Budi Mulya. Perry berhasil mengungguli koleganya Hendar setelah serangkaian uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI.

“Dengan memperhatikan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, berdasarkan musyawarah dan mufakat, Komisi XI memilih Perry Warjiyo sebagai Deputy Gubernur BI yang baru untuk menggantikan Budi Mulya yang sudah memasuki masa pensiun,” kata Ketua Komisi XI Emir Moeis di depan Sidang Paripurna DPR, Selasa (19/3).

Emir menambahkan, Komisi XI telah memberi beberapa catatan dan rekomendasi kepada Perry untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Dewan Gubernur BI. Komisi XI juga merekomendasikan kepada Perry untuk memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

“Ada beberapa catatan yang telah kami berikan kepada saudara Perry dalam menjalankan tugasnya, salah satunya kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional. Kami juga telah menyarankan agar dalam pengelolaan arus modal asing, BI memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional,” jelas Emir.

Komisi XI juga berharap Dewan Gubernur BI dapat menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur guna menilai kinerja Dewan Gubernur, serta kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan BI berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. (sf)/foto: iwan armanias/parle.

Panja Vaksin Flu Burung Terima Penjelasan BAKN

Panitia Kerja Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Vaksin Flu Burung (Panja Vaksin Flu Burung) Komisi IX DPR RI dapat menerima penjelasan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pembangunan sarana dan prasarana pabrik vaksin flu burung.

“Panja Komisi IX dapat menerima penjelasan BAKN tentang anggaran yang tidak disetujui sebesar Rp. 604.351.869.000,00 untuk tahun 2011. Dengan demikian, total anggaran dari tahun 2008 – 2011 sebesar Rp. 2.252.342.095.000,00 baru terealisasi sebesar Rp. 926.195.892.500,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.326.146.202.500,00,” kata Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf saat memimpin rapat bersama dengan BAKN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3).

Panja Vaksin Flu Burung, kata Nova, akan segera merumuskan rekomendasi di dalam Rapat Internal Panja untuk disepakati dalam Rapat Pleno Komisi IX DPR RI.

Dalam rapat bersama Komisi IX dan BAKN, anggota BAKN yang menghadiri rapat tersebut, yaitu Ketua BAKN, Sumaryati Aryoso dan anggota BAKN, Eva Kusuma Sundari.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BAKN Sumaryati Aryoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus melakukan penyelidikan, karena proyek pembangunan



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf beramah tamah dengan Ketua BAKN Sumaryati Aryoso dan Anggota BAKN Eva Kusuma Sundari.

pabrik ini sejak awal telah di desain menyimpang dari kaidah yang berlaku secara umum.

Rapat bersama Komisi IX dan BAKN ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pabrik vaksin flu burung. Dari audit BPK proyek sebesar Rp 2,4 triliun tersebut diduga merugikan negara Rp 600 miliar. (sc)

Komisi V Sidak 4 Stasiun Kereta Api Jakarta



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama bersama sejumlah Anggota Komisi V saat melakukan Sidak dan berdialog dengan penumpang KA.

Tim Komisi V DPR RI yang diketuai Laurens Bahang Dama, Rabu (20/3) pagi melakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke empat stasiun kereta api di Jakarta, yaitu stasiun Tanah Abang, Manggarai, Jatinegara dan stasiun Pasar Senen, Jakarta.

Sidak tersebut menurut Laurens, berkaitan dengan PSO (*Public Service Obligation*) dari Pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 704 miliar rupiah. Lebih tepatnya, subsidi yang diberikan khusus untuk kereta api ekonomi non-AC.

“PT KAI berencana untuk meng AC kan semua kereta, termasuk kelas ekonomi. Namun dampaknya harga tiket ekonomi harus dinaikkan sebesar 200 persen. Inilah yang kita lakukan sekarang, mengetahui secara langsung aspirasi masyarakat pengguna kereta api, apakah mereka setuju dengan rencana tersebut,” jelas Laurens.

Ditambahkannya, konon harga karcis kelas

ekonomi sudah sebelas tahun tidak mengalami kenaikan. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi rencana PT KAI untuk menaikkan harga tiket kelas ekonomi namun ditunjang juga dengan peningkatan fasilitas kereta api.

Sayangnya, sepertinya rencana PT KAI tersebut tidak mendapat dukungan masyarakat pengguna kereta api. Pasalnya, saat sidang oleh Anggota Komisi V DPR, hampir sebagian besar pengguna kereta kelas ekonomi menolak kenaikan tersebut.

“Harga karcis sekarang dua ribu rupiah, tolong jangan dinaikan lagi pak. Karena semua angkutan sudah mahal, hanya kereta api lah yang masih murah, saya tidak sanggup untuk naik bis ke tempat kerja saya di Bogor,” pinta

Sholeh, salah satu pengguna kereta api kepada Laurens dan Anggota Komisi V DPR lainnya yang menemuinya di stasiun Tanah Abang, Jakarta.

Menanggapi permintaan tersebut, Laurens berjanji akan meneruskan permintaan tersebut ke Pemerintah dan PT KAI sendiri. Dikatakannya, Komisi V DPR akan selalu memperhatikan kepentingan dan keinginan masyarakat luas.

“Kenaikan harga tersebut mungkin bisa disiasati dengan subsidi (PSO) ke PT KAI tadi. Namun subsidi tersebut tentunya bukan untuk lembaga atau badannya saja. Melainkan langsung ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah yang menjadi pengguna kereta api. Misalnya dengan kartu subsidi khusus. Pastinya disetiap kelurahan

ada data-data pengguna kereta api yang termasuk masyarakat kurang mampu.” kata Laurens yang diamini beberapa Anggota Komisi V lainnya.

Dengan demikian menurut Laurens, subsidi untuk masyarakat kurang mampu itu akan tepat sasaran dan sesuai dengan semangat Undang-Undang No.23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dimana perkeretaapian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, yaitu bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian. (Ayu)

Tapera Alat Efektif Ajarkan Budaya Menabung



Anggota Pansus RUU Tapera Indah Kurnia saat diskusi uji publik di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.

Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) yang merupakan usul inisiatif DPR RI, saat ini telah memasuki tahap pembicaraan Tingkat I. Ditargetkan RUU ini dapat segera disahkan pada Juli 2013. RUU ini sekaligus menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan budaya menabung.

Demikian disampaikan Anggota Pansus RUU tentang Tapera, Indah Kurnia dalam diskusi uji konsep RUU Tapera, di Ruang Pola, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/3).

Indah mengatakan, azas diberlakukannya UU ini adalah gotong royong. Jadi kalau gotong royong maka ada sebagian masyarakat yang tidak akan pernah memperoleh manfaat yang dimaksud sampai akhir periode kepesertaannya. Tapi

harus dicatat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat yang telah memiliki rumah dan memberi iuran maka kita sudah membantu pemerintah memberi kesempatan untuk melengkapi kebutuhan pokok masyarakat yaitu papan.

“Hal ini tercantum pada Bab II pasal 2, bahwa Azas dan Tujuan diberlakukannya UU ini adalah Gotongroyong. Walaupun nantinya bukan rumah, iuran peserta yang telah mempunyai rumah itu akhirnya menjadi dana yang akan kembali sebagai investasi berupa tabungan. Dengan demikian Tapera sekaligus menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan budaya menabung” ujarnya menanggapi peserta diskusi yang mempertanyakan keuntungan Tapera pada masing-masing peserta, serta hak dan kewajibannya.

Indah menambahkan, UU ini nantinya akan memberikan kepastian hukum mengatur hubungan antara pekerja, pemberi kerja, pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam penyediaan dana jangka panjang bagi perumahan dengan menjunjung azas-azas keterjangkauan, berkeadilan dan gotong royong (*law of large number*).

Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU Tapera Refrizal menambahkan bahwa mekanisme teknis dari UU ini tentu akan diatur melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

“Bukan masalah dapat atau tidak dapat rumah. Tapi ini wajib. Maka yang kemudian harus diatur bagaimana memenuhi hak para peserta Tapera dan tak lepas tetap membantu saudara yang tidak mampu” jelas Refrizal

Oleh sebab itu, tabungan perumahan harus diletakkan sebagai bagian dari sistem pembiayaan perumahan nasional (bersama perbankan, lembaga pembiayaan sekunder



Wakil Ketua Pansus RUU Tapera Refrizal memimpin diskusi uji publik di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.

perumahan dan stakeholder terkait), dalam wujud satu kesatuan fungsi dalam pengerahan dana masyarakat.

Pengerahan dana diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan perizinan serta pengadaan lahan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Asisten II Ekonomi Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan A. Yaksan Hamzah mengatakan, pihaknya telah membentuk suatu lembaga penjaminan kredit guna mendukung perekonomian tingkat desa yang diharapkan bisa membantu tapera yang akan terbentuk.

“Memang harus ada suatu kekuatan yang kompeten sehingga masyarakat bisa menikmati kredit secara mudah

dan aman. Sulsel dan kawasan timur Indonesia perlu sentuhan perbankan yang bijak terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah, yang secara teknis mestinya juga tertuang di RUU Tapera ini” katanya.

Yaksan berharap RUU ini membawa kebijakan yang memperhatikan kondisi lokal khususnya kawasan timur yang tentu mempunyai banyak perbedaan dan ciri tersendiri. “Kami perlu kesepakatan sesuai kawasan, kemampuan lokal yg ada. Keadaan kami tentu berbeda dengan daerah Jawa. Demikian pula masyarakat pedesaan tentu juga berbeda dengan perkotaan,” tambahnya lagi.

Diskusi yang diadakan Pansus RUU Tapera DPR RI di Makassar ini dihadiri berbagai kalangan, antara lain pihak Perbankan, PT Jamsostek, Akademisi, APINDO Sulsel dan berbagai instansi Pemerintah Sulsel. (ray) foto:ry/parle

Ketua DPR Lantik Tiga Anggota Baru



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik tiga Anggota Pengganti Antar Waktu.

Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik secara resmi tiga anggota baru DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW), Rabu (20/3). Para anggota baru tersebut masing-masing dua dari F-PKB dan satu dari F-Gerindra.

Mereka adalah Jazilul Fawaid dan Andi M Romly dari F-PKB. Sementara dari F-Gerindra adalah Dahlia. Ketua DPR mengambil sumpah anggota baru tersebut disaksikan para anggota DPR lainnya dan undangan.

Jazilul Fawaid berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) II, menggantikan

anggota lama Lily Chodidjah Wahid. Sementara Andi M Romly berasal dari dapil Jatim X, menggantikan Effendy Choirie.

Pimpinan DPR sendiri sebetulnya sudah menerima surat permohonan PAW dari PKB ini, sejak 7 Maret 2011. Kedua anggota baru dari F-PKB ini dilantik di tengah gugatan hukum oleh dua anggota lama yang diganti.

Sedangkan anggota baru dari F-Ge-rindra, Dahlia menggantikan Harun Al Rasyid yang ternyata sudah lompat pagar ke Partai Hanura dan sedang men-

calonkan diri dalam kontes Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato sambutannya, menyampaikan, agar ketiga anggota baru tersebut segera beradaptasi dengan lingkungan parlemen dan mempelajari berbagai produk UU dan kode etik anggota DPR RI.

Soal gugatan hukum, lanjut Marzuki, DPR tetap menjalankan prosedur pelantikan karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan DPR sudah menerima surat dari KPU dan surat Keputus-

an dari Presiden. Acara pelantikan ini tidak perlu terpengaruh oleh gugatan hukum, sampai ada keputusan inkrah dari MA.

Atas nama pimpinan, Marzuki juga mengucapkan selamat kepada ketiga anggota baru yang akan melaksanakan tugas anggota dewan di sisa waktu yang ada untuk periode 2009-2014. Ketiganya harus memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya untuk kepentingan bangsa dan negara. (mh) foto:ry/parle

Pengaduan Publik Meningkat, Bentuk Kecintaan pada DPR

Upaya Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI mengoptimalkan komunikasi antara rakyat dengan wakilnya di parlemen menunjukkan hasil positif. Salah satu indikasi keberhasilan adalah pengaduan masyarakat yang disampaikan lewat pesan singkat (sms) dan jaringan internet meningkat.

“Tahun 2012 lalu pengaduan masyarakat yang masuk lewat sms, jaringan *on line* mencapai lebih dari 45 ribu. Apapun isinya kita ambil positifnya, bagaimanapun ini menunjukkan DPR dicintai masyarakat terlihat dari banyaknya surat-surat pengaduan yang masuk dari daerah,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti dalam sambutannya kepada peserta Diklatpim Tingkat II, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/13).

Kesetjanaan lanjutnya menganalisa seluruh pengaduan kemudian dipilah sesuai komisi dan alat kelengkapan DPR untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia menyebut ada juga surat yang berisi caci maki, bahkan ada masukan setelah menyaksikan tayangan dialog di TV. Mereka menyatakan keberatan pada pendapat anggota DPR yang menjadi nara sumber dalam acara tersebut.

Kepada 120 peserta Diklatpim, pejabat setingkat eselon II dari Kementerian, Pemprov, Kabupaten/Kota, Sekjen menjelaskan sistem penganggaran di DPR berdasarkan *performance-based budgeting*. Ini mengacu pada UU



Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti menerima 120 peserta Diklatpim Tingkat II pejabat setingkat eselon II dari Kementerian, Pemprov, Kabupaten/Kota.

no.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU no.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU no.15/2004 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Negara.

“Aturan kita sebenarnya sudah bagus, pelaksanaan seharusnya bisa menjadi lebih baik setiap waktu. Masih perlu proses dan sejumlah penyesuaian,” imbuhnya kepada peserta diklat yang khusus datang untuk mengetahui rumusan kebijakan publik di DPR.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia agar tidak lupa membangun jaringan kerja/*networking*. Langkah ini dapat membangun pemahaman yang sama terhadap berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah, yang akan menguatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas setelah selesai menempuh pendidikan penjenjangan ini. (iky)foto:vy/parle

Ketua DPR Terima Kunjungan Sekjen AIPA



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Sekjen AIPA Periwosamy Otharam.

Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III Senayan Jakarta, Rabu (20/3) menerima kunjungan kehormatan Sekjen Asean Inter Parliametary Assembly (AIPA) Periwosamy Otharam. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas dana untuk operasional Setjen AIPA. “Sekjen AIPA yang baru, mengajak Sekjen DPR untuk

mendiskusikan biaya-biaya yang diperlukan selama setahun terkait iuran anggota organisasi parlemen Asean apakah masih memadai atau tidak,” kata Marzuki.

Marzuki mengakui, memang ada usulan untuk menaikkan iuran. “Sepanjang itu rasional dan logis serta memang diperlukan, akan saya dukung,” ujarnya. Meski demikian, dia meminta agar masalah tersebut dibicarakan dulu dengan Sekjen DPR supaya apa-

pun yang disetujui memang benar-benar diperlukan.

Menanggapi kesiapan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA yang akan datang, Pimpinan Dewan dari Fraksi Demokrat ini menyatakan keyakinannya bahwa negara itu mampu menggelar pertemuan pemimpin parlemen Asean. Pertemuan atau Sidang Umum AIPA adalah agenda rutin dan bukan sesuatu yang luar biasa dan bukan merupakan forum pemilihan. “Ini adalah giliran antar anggota AIPA. Berbeda dengan forum *Parliamentary Union Of OIC Member State* (PUIC)-Parlemen negara-negara anggota OKI, disana ada pemilihan,” ujarnya.

Ketika Ketua DPR Marzuki Alie ditunjuk sebagai Presiden PUIC di Uganda beberapa waktu lalu, agendanya adalah pemilihan. Berbeda dengan AIPA, sifatnya adalah pergantian atau bergiliran sesuai abjad yang selama ini sudah berjalan. “Kalau anggota Asean ada sepuluh, maka setiap sepuluh tahun mendapat giliran memimpin dan menjadi tuan rumah sidang parlemen Asean.” ungkap Marzuki Alie. (mp) foto: wy/parle

Komisi VI Kecewa Dengan Menteri BUMN



Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi.

Anggota Komisi VI Daniel Luban Tobing merasa kecewa dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan atas tindakan melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diberitakan sebelumnya, Dahlan meminta KPK untuk menelusuri proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Timur dan Riau, ketika ia menjabat sebagai Dirut PLN. Rumor beredar bahwa ada kecurangan dalam proyek bernilai Rp. 1,6 triliun itu.

“Kenapa sebagai Menteri malah melaporkan ke KPK untuk mengklarifikasi rumor? KPK itu bukan

lembaga klarifikasi, masa Menteri tidak mengerti. Untuk mengklarifikasi itu harusnya datang ke BPK,” kata Daniel ketika Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Deputi BUMN dan Dirut PLN di Gedung Nusantara I, Rabu (20/3).

Masih terkait dengan proyek PLTU di Kaltim dan Riau, Anggota Komisi VI Ferrari Romawi meminta Dirut PLN untuk menjelaskan bagaimana prosedur pengadaan tender pembangkit listrik itu. Termasuk bagaimana spesifikasi dan pemenang tendernya.

“Secara ringkas, kami dapat mengetahui bagaimana proses

tender itu, dari pelemangannya, spesifikasi teknisnya, lead-ernya siapa, sampai siapa pemenangnya. Termasuk pertimbangan PLN memenangkan tender itu. Jangan seperti sekarang, kami tidak mengetahui bagaimana soal proyek itu,” ujar Ferrari.

Ferrari juga meminta PLN untuk melaporkan bagaimana progres pembangunan masing-masing PLTU, apakah ada

hambatan dalam pembangunannya, termasuk rencana PLN dalam menjalankan dan mengembangkan PLTU ini.

Rapat berakhir tanpa ada jawaban dari PLN dan BUMN. Namun Komisi VI meminta PLN untuk menjawab semua pertanyaan dan masukan dari Komisi VI pada rapat berikutnya. Sementara, rapat diagendakan pada esok harinya, Kamis (21/3). (sf,vi)

Aliran Dana Robert Tantular Melalui Bank Century Terindikasi Pencucian Uang



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan Gita Wiryawan serta pihak terkait menjelang rapat Timwas Century DPR.

ada kepemilikan secara langsung atau tidak langsung. Namun ujarnya, kehadiran di rapat Timwas dengan penuh kesediaan untuk menjawab beberapa pertanyaan atau komentar-komentar yang perlu diklarifikasi terkait dengan keterlibatan Pt Ancora Land.

Namun sejumlah anggota Timwas menyatakan, panggilan kepada Gita Wiryawan karena PT Ancora, sebab perusahaan ini mengakuisisi GNU sedangkan prosesnya tidak lazim. “ Ada indikasi aset-aset di dalam negeri terkait Bank Century mau dikaburkan sehingga tidak bisa ditelusuri, contohnya GNU,” tandas anggota FPKS, Indra.

Aliran dana dari Robert Tantular melalui Bank Century yang diindikasikan merupakan bagian praktek pencucian uang hasil kejahatan Robert Tantular. Demikian salah satu catatan rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR yang dipimpin Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan dengan Gita Wiryawan, Dirut PT Graha Nusa Utama dan Yayasan Fatmawati di Gedung DPR Rabu (20/3).

Catatan Timwas lainnya adalah akuisisi PT Ancora Land terhadap PT Nusa Utama Sentosa (NUS) dan PT Graha Nusa Utama (GNU), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Timwas Century untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekomendasi DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2010 terkait kasus Bank Century.

Mengawasi penjelasannya dihadapan Timwas Gita Wiryawan menyatakan sejak diangkat menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, pihaknya telah mendelegasikan kepemilikan dan kapasitas manajerial ke seluruh professional Grup Ancora.

Terkait dengan pemberitaan yang muncul belakangan ini sehubungan perusahaan Ancora Land, dirinya tidak

Karena itu dia mengusulkan Timwas memanggil para penyidik dan para penuntut dalam mengkonstruksikan kasus tindak pidana pencucian uang atas GNU, sehingga lebih klir dan ada harapan yang jelas. “ Jadi ending atau akhir dari tugas Timwas adalah memberi solusi kongkrit pengembalian dana nasabah. Ini terpenting,” katanya.

Sebelumnya anggota Timwas Century dari fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan Gita Wiryawan diketahui sebagai salah satu pemilik PT. Ancora Land. “PT. GNU dan PT. NUS diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dari PT. Antaboga Delta Securitas dan Bank Century oleh Ancora Group,” jelas Bambang.

Dugaan tersebut didasari atas temuan Mabes Polri dalam penyelidikan kasus reksadana PT. Antaboga Delta Securitas yang mengalir ke PT. Graha Nusa Utama yang diakuisisi oleh PT. Ancora Capital yang merupakan milik Gita sejak tahun 2010. Berdasarkan data yang dimiliki Timwas Century, 55 persen saham PT Graha Nusa Utama itu dibeli oleh PT Ancora Capital, padahal perusahaan ini bermasalah. (mp) foto:wy/parle

Komisi II DPR: Pemekaran Daerah Harus Sesuai Aturan

DPR menegaskan pembahasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi obyektif di lapangan. Di samping itu, *spirit* dari pembentukan DOB juga harus berpedoman pada percepatan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov Papua dan Papua Barat, Kaukus Parlemen Papua, MRP Papua dan Papua Barat serta para Kepala Daerah-Kota, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).

“Hal-hal yang berkenaan dengan proses DOB, Komisi II DPR sangat terbuka untuk terus memberikan ruang publik yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya di Komisi II DPR, dengan catatan penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara mengikuti aturan hukum dan budaya demokrasi yang sehat tanpa harus mencederai satu sama lain,” kata Agun.

Menurut politisi dari Partai Golkar itu, keseriusan DPR dalam pembahasan DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat dibuktikan dengan dapat menerima secara resmi semua aspirasi yang disampaikan Pemprov Papua dan Papua Barat, MRP dan DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Untuk itu Komisi II DPR akan memulainya esok hari (Rabu 20/3) mengundang Mendagri untuk mengetahui sudah sejauh mana ide, pikiran gagasan pemerintah soal pemekaran di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Agun menjelaskan, agenda rapat kali ini yakni membahas usul pembentukan DOB yang berasal keseluruhannya dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. “Ada delapan DOB dari 33 DOB yang belum diverifikasi ulang dan belum menjadi draft RUU DPR,” ujarnya.

Seperti diketahui, rapat dengar pendapat pembahasan pembentukan DOB Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selalu menjadi perhatian penuh pihak DPR. Terlebih, dalam suasana rapat tidak jarang terjadi hujan interupsi dan bahkan sempat terjadi keributan, dikesempatan itu juga, pimpinan rapat Agun Gunanjar sempat berang dan mengetuk palu dengan keras untuk menenangkan situasi rapat.

Padahal sebelumnya, untuk menghindari hal tersebut, di awal rapat secara tegas, Agun meminta semua pihak untuk menghargai perbedaan dalam pembahasan pembentukan DOB. “Tolong hargai perbedaan, itu bagian dari demokrasi. Kita sekarang dalam berproses. Masa dalam tahap pertama saja, kita kena dalam sandungan kita tidak bisa bertindak cerdas. Hargai perbedaan itu, kita semua akan pastikan akan ada tahap selanjutnya yaitu ada dialog serta verifikasi mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu dalam paparannya, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O Atururi berharap DPR dan pemerintah

pusat dapat segera **m e n g a b u l k a n** pembentukan DOB di tanah Papua yakni Provinsi Papua Utara, Papua Tengah dan Papua Selatan. “Sebagai putra daerah, saya berharap ketiga DOB ini bisa memiliki kepastian hukum untuk bisa dimekarkan,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya tidak permasalahan jika ada pihak-pihak yang sudah dulu mengusulkan DOB selain ketiga DOB tersebut. “Kalau

(usulan DOB-red) yang sudah jalan silakan diproses. Kalau di Papua nantinya ada sepuluh DOB, saya berharap ada delapan daerah daratan ditambah dengan dua daerah kepulauan. Apabila nantinya cuma ada delapan, itu juga tidak masalah yang penting komposisinya enam daerah daratan dan dua daerah kepulauan, yakni Teluk Cendrawasih dan Raja Ampat,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Constan Karma mengatakan saat ini pilihan DOB baik di provinsi ataupun kabupaten/kota di wilayah Papua menjadi pilihan yang luar biasa untuk pengembangan kawasan di Papua.

“Pengembangan ini menjadi penting karena melihat pengalaman-pengalaman DOB yg lalu di Papua sehingga masyarakat melihat DOB untuk pengembangan masyarakat. Kami akui ada prosedur yang sudah kami lakukan di daerah untuk pengembangan DOB ini misalnya saja ada presentasi dari para ahli soal pengembangan kawasan disana,” katanya. (nt)foto:iw/parle



RDP Komisi II DPR dengan Pemprov Papua dan Papua Barat, Kaukus Parlemen Papua, MRP Papua dan Papua Barat serta para Kepala Daerah-Kota.

Komisi IV Sidak Kontainer Berisi Bawang Putih di Pelabuhan Tanjung Priok



Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy didampingi Wakil Ketua Komisi dan sejumlah Anggota Komisi IV melakukan Sidak ke Terminal Peti Kemas Tanjung Priok.

Komisi IV DPR menggelar inspeksi mendadak ke Depo Upaya Guna, Pintu I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyusul kelangkaan bawang. Sejumlah anggota Parlemen itu menemukan ratusan ton bawang putih yang berada dalam puluhan kontainer, Jakarta Utara, Senin (18/3).

Rombongan itu dipimpin Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy dan diikuti sejumlah anggota Komisi IV seperti Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, Anton Sihombing, Siswono Yudhohusodo (FPG), Sudin (FPDIP), dan Muradi Darmansah (F Hanura), Yan Siagian, Anak Agung Jlantik Sanjaya, Darizal Ba'asir. Anggota Dewan mempertanyakan 40 kontainer bawang putih impor dari China tanpa menggunakan surat-surat sebelum dikirim dari pelabuhan Belawan Medan ke Tanjung Priok Jakarta.

Terdapat 40 kontainer berisi bawang yang diimpor dari China di lokasi tersebut. Kehadiran kontainer bawang

itu mengundang perhatian lantaran Tanjung Priok tidak termasuk dalam dua pelabuhan yang menjadi tujuan barang impor untuk produk bawang.

“Hanya dua pelabuhan di Indonesia yang bisa (impor bawang), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Belawan, Medan,” terang Rommy, sapaan Ketua Komisi IV DPR itu.

Komisi IV sempat berdialog dengan perwakilan perusahaan, Kepala Pusat Pengawasan dan Penindakan/Kepatuhan Badan Karantina Pertanian Arifin Tasmir, serta petugas bea cukai. Masing-masing pihak diminta menjelaskan keberadaan peti kemas tersebut.

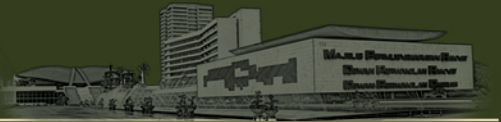
Setelah mendengar keterangan mereka, DPR lantas meminta untuk membuka salah satu kontainer. Isi kontainer benar bawang yang disebut perwakilan perusahaan PT Sumber Alam Rejeki, diimpor untuk memasok kebutuhan industri, bukan untuk dipasarkan bagi masyarakat umum.

“Dokumen impornya sudah lengkap, tapi perusahaan masih harus melengkapi dokumen pengangkutan *inter island* (antarpulau) dan harus mendapat izin pelepasan dari Badan Karantina Belawan ke Tanjung Priok. Namun barang sudah dikirim,” kata Romahurmuziy.

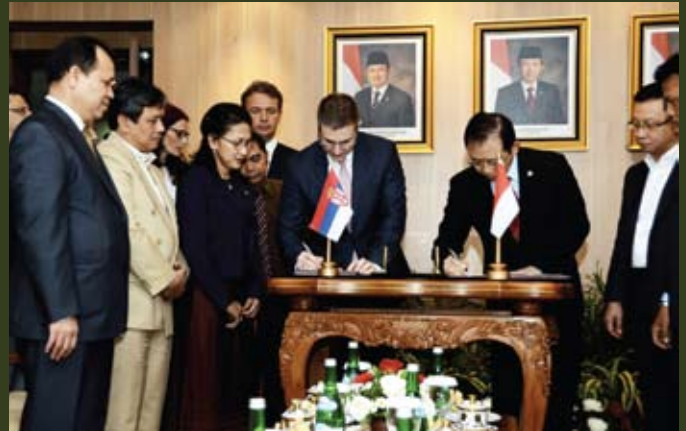
Dalam sidak tersebut, anggota Dewan juga menemukan 9 kontainer telah keluar dari depot tanpa ada laporan. Hingga kini, belum diketahui keberadaannya.

Sementara Pihak Balai Karantina mengaku tak mengetahui keberadaan 9 kontainer yang ‘hilang’ itu dengan alasan tak ada laporan saat kontainer-kontainer itu masuk ke Tanjung Priok.

Komisi IV DPR akan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan kontainer-kontainer ini guna mengetahui status keabsahan pengiriman kontainer tersebut. Jika terbukti ada kejanggalan atau pemalsuan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terlibat termasuk sang pemilik bawang putih itu. (as)



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat bertemu Sekjen AIPA Periowsamy Otharam ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III Senayan Jakarta, Rabu (20/3). foto:wy/parle



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPR RI (Marzuki Alie) dan National assembly of the Republic of Serbia (Nebojsa Stefanovic) di R Gedung DPR, Senin (18/3). foto:HR/parle



Tim Komisi V DPR RI yang diketuai Laurens Bahang Dama melakukan inspeksi ke empat stasiun kereta api di Jakarta (Tanah Abang, Manggarai, Jatinegara dan Pasar Senen) pada Rabu (20/3) pagi (foto kiri) dan ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng Jakarta, Kamis (21/3). Foto: AP, IV /parle



Badan Anggaran DPR dipimpin Ahmadi Noor Supit menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar yaitu Dr. Ryad Khairil dan Dr. Arif Satria, mengenai optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan, Kamis (21/3). foto:RY/parle